

## **Fenomena Pemerintah Desa Dalam Hubungan Politik Bernegara** ***The Phenomenon of Village Government in State Political Relations***

Jupianus Sitepu<sup>1)</sup>, Muhammad Ahasannudin<sup>2)</sup>, Rahel Br Sukatendel<sup>3)</sup>,  
Maria Kristina Situmorang<sup>4)</sup>, Jusuf Sitepu<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup>Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

<sup>2)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

<sup>3)</sup>Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Darma Agung

<sup>4)</sup>Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

<sup>5)</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Quality

Email: [jupianus.karona@gmail.com](mailto:jupianus.karona@gmail.com)

### **Abstrak**

*Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Pembangunan desa utamanya adalah tanggung jawab pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam negara sangat penting, peran tersebut tidak hanya dalam pembangunan namun juga dalam hubungan politik bernegara. Dalam politik pemerintah desa berperan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memberikan pendidikan politik. Keduanya tersebut secara tidak langsung akan merubah kebijakan negara. Semua dimulai dari desa, baik partisipasi, dukungan serta pola hidup masyarakat. Peran kepala desa dalam hal ini vital karena menjadi tombak untuk mengimplementasikan pendidikan politik dan mengawal untuk memaksimalkan partisipasi politik warganya.*

*Kata Kunci: Pemerintah Desa, Hubungan Politik, Politik Bernegara.*

### **Abstract**

*A village is a territorial unit inhabited by a number of families who have their own government system. Village development is primarily the responsibility of the village government. The role of village government in the country is very important, this role is not only in development but also in state political relations. In politics, the village government plays a role in increasing community political participation and providing political education. Both of these will indirectly change state policy. It all starts from the village, including participation, support and community lifestyle. The role of the village head in this case is vital because he is the spearhead for implementing political education and overseeing maximizing the political participation of his citizens.*

*Keywords: Village Government, Political Relations, State Politics.*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan pada tingkat desa dan kelurahan yang secara entitas berbeda, memerlukan model manajemen pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan tersebut harus sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk di dalamnya adat

setempat yang diakui pemerintah. Entitas desa dan kelurahan sepanjang peradaban masih ada, maka akan terus berkembang secara dinamis, rasional dan realistis, sehingga munculah fenomena perubahan status desa menjadi kelurahan. Taggung jawab pemerintahan desa bukanlah hanya mengatur desanya menjadi lebih baik, dengan infrastruktur yang semakin meningkat, dan memastikan semua rakyatnya merasa aman, tentram dan damai. Peran pemerintahan desa dalam hubungan bernegara adalah menjadi panutan yang dapat mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Pemerintah desa menjadi titik tumpu dalam hal hubungan politik bernegara. Jika tidak ada pemerintah desa maka politik di Indonesia pasti akan kacau. Tidak ada pemerintahan yang baik dan kemudian timbullah ketidakpastian. Peran pemerintah desa yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam semua program pemerintah ataupun saat pemilihan pemimpin. Dalam kehidupan yang demokrasi ini di Indonesia, rakyat memiliki kekuasaan mutlak, artinya pemimpin akan ditentukan dari jumlah *vote*; hal inilah yang diinginkan oleh negara, bahwasannya para warga ikut langsung berpartisipasi tanpa ada rasa sungkan. Namun kaitannya dengan partisipasi politik, banyak warga yang belum mengerti arti demokrasi. Mereka hanya ikut berpartisipasi semata-mata karena tawaran uang atau jabatan. Beberapa warga kita akan lebih memilih calon yang memberi uang lebih banyak ketimbang calon yang memberikan uang sedikit tapi sebenarnya mampu merubah keadaan negara menjadi lebih baik.

Karena itulah peran pemerintah desa hanya sebagai pendorong untuk warga untuk berpartisipasi melainkan memberikan pendidikan politik. Pendidikan tersebut diberikan guna memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa partisipasi politik yang baik akan berpengaruh pada kebijakan negara selanjutnya. Bertitik tumpu dari masalah tersebut penulis tertarik ingin meneliti "Fenomena Pemerintah Desa dalam Hubungan Politik Bernegara".

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, maka peneliti menganalisa dengan cara metode kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, meliputi uji kredibilitas yakni pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis, serta menggunakan referensi yang akurat

## PEMBAHASAN

Konsep Ferdinand Tonies bahwa masyarakat pedesaan berbentuk peguyuban (*gemeinschaft*) yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan akan berbeda dengan masyarakat perkotaan yang berbentuk patembayan (*gesellschaft*) yang cenderung individualistik. Sehingga karena masyarakatnya berubah, maka organisasi pemerintah yang melayani jga perlu disesuaikan. Terlepas dari konsep desa yang masih penuh dengan nilai kebersamaan. Pemerintah desa merupakan organisasi birokrasi yang ada di tingkat desa. Walaupun ada di tingkat desa pemerintah desa juga dituntut untuk maksimal agar tercapainya pelayanan masyarakat.

Peran pemerintah desa tidak hanya sebatas kinerja pelayanan publik namun juga hubungan politik bernegara. Hubungan politik tidak dapat dipisahkan dengan adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kaitannya fenomena pemerintah desa dalam hubungan politik bernegara, pemerintah desa khususnya seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran sesuai konteksnya. Peranan ini kemudian akan dibantu oleh seluruh jajaran perangkat pemerintah desa. Pemerinyah desa memiliki dua peranan penting yakni mendorong warga untuk berpartisipasi politik kemudian memberikan pendidikan politik. Seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran sesuai konteksnya.

Pada partisipasi politik, terjadi saat pesta demokrasi mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilu legislatif. Keikutsertaan warga dalam memilih secara tidak langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Sistem demokrasi yang sudah berjalan akhirnya akan memberikan dampak pada kebijakan-kebijakan politik pada mendatang. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menjadikan masyarakat paham akan arti demokrasi. Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah hanya memahami politik sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan- gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa dan karena faktor *money politic*.

*Money politic* atau politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain (masyarkat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada prises politik dan kekuasaan atau tindakan membagi-bagikan uang, bauk miulik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Beberapa faktor yang mempengaruhi politik uang yakni, kemiskinan, rendahnya pengetahuan dan kebudayaan. Lebih mirisnya lagi ada beberapa warga yang memiliki kecukupanekonomi dan pendidikan yang tinggi terkadang ikut pula tergiur menerima politik uang

karena sudah mendarah daging. Hal ini sudah menjadi budaya politik yang ada di Indonesia dan sulit untuk dihilangkan.

Kebudayaan adalah bagian hidup dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Budaya politik di Indonesia tak dapat dipungkiri masih erat kaitannya dengan politik uang hampir di semua pelosok daerah. Para warga akan memilih calon pemimpin yang akan memberinya banyak keuntungan daripada memikirkan nasib bangsanya di kemudian hari. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin.

Dari fenomena budaya politik di atas peran pemerintah desa adalah tetap dengan mendorong warganya berpartisipasi politik, karena jika masyarakat melakukan golput tentu pemerintahan tidak akan berjalan, inilah peran penting pemerintah desa bahwa kepala desa dan semua jajaran perangkatnya wajib menjadi panutan agar warganya tetap ikut berpartisipasi politik. Partisipasi politik juga berupa peran serta masyarakat perencanaan dan pelaksanaan, saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi. Mengenai partisipasi politik, pemerintah desa akan memberikan pendidikan politik guna memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para warganya agar tidak hanya memandang politik sebagai sesuatu yang menguntungkan diriya namun demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan dimaksudkan agar para warga negara ini menjadi patriotisme nasional.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa pendidikan politik sangatlah penting. Pendidikan politik ialah upaya pemahaman hakikat politik dan tujuan bangsa yang sebenarnya, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya pendidikan ini diharapkan masyarakat sadar bahwa budaya politik uang yang saat ini ada bukanlah budaya yang baik bagi keberlangsungan bangsa. Selanjutnya setelah pendidikan politik tersampaikan dengan baik, maka bagi semua masyarakat untuk lebih jeli membaca berita di media sosial. Media sosial tersebut meliputi facebook, whatsapp, instagram dan lain sebagainya. Terlebih instagram, medsos yang satu ini sangat trend dan masih banyak digunakan sampai sekarang. Instagram identik dengan *followers* dan *following*. *Followers* adalah akun yang mengikuti pengguna tersebut sementara *following* adalah akun yang diikuti pengguna tersebut. Medsos memiliki dampak negatif dan positif bagi politik. Dampak negatifnya adalah adanya berita hoaks dan dampak positifnya adalah mudahnya berkomunikasi sehingga memungkinkan kemudahan-kemudahan saat ada kegiatan politik.

Dari penjelasan di atas, masih banyak tantangan ke depan bagi pemerintah desa untuk terus memberikan peran agar hubungan politik bernegara tetap baik dan sesuai tujuan. Tujuan sesuai demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung. Karena itu tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciotakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa fenomena peran pemerintah desa dalam hubungan politik bernegara adalah Pemerintah mempunyai peran mendorong warga untuk berpartisipasi politik dan pemerintah mempunyai peran memberikan pendidikan politik pada warga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bhakti, Indira Swasti Gama dan Tri agus Gunawan, 2020, Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Desa Mlagen, Magelang, Jurnal Suara Hukum, Volume 2 Nomer 1, Maret.
- Cangara, Hafied, Edisi Revisi Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, Negara Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Hakim, Arif Rahman, Iman Surya dan Nur Hasanah, 2018, Peran Kepala Desa meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi, 2013, Hukum, Hak asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kumolo, Thahjo, 2015, Politik Hukum PILKADA Serentak, Bandung: PT Mizan Publika. Mujani, Saiful, dkk, 2012, *Kuasa Rakyat*, Jakarta: Mizan Publika, PP No. 47 Tahun 2015.
- Pramusinto, agus dan M. Syahbudin Latief, Dinamika Good Governance di Tingkat Desa, <https://ejournal.unri.ac.id>, diakses pada tanggal 13 November 2022.
- Prasojo, Rizky A. dan Luluk Fauziah, Peran Pemerintah Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedayi Kabupaten Sidparjo, <https://jkmp.umsida.ac.id>, diakses tanggal 13 November 2022.
- Setiadi, Elly M., 2012, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta: Kencana. Simangunsong, Fernandes, 2014, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siswono, Dwi, dkk, 2013, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: UNY Press Sugiarto, dkk, 2013, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: UNY Press, 2013.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Utari Putri, Peran Pemerinyah dalam Mendorong Partisipasi Poitik Masyarakat dalam pembangunan, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 13 November 2022.